



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Catatan	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
1	PENDAPATAN - LRA (3 + 9 + 20)	5.2.1.1	2.553.547.049.717,00	2.731.491.817.451,50	106,97	2.609.501.844.013,92
2						
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA (4 s/d 7)	5.2.1.1.1	717.137.755.259,00	815.664.188.996,50	113,74	677.803.723.304,94
4	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.2.1.1.1.1	505.227.578.248,00	596.780.850.288,00	118,12	392.686.405.543,00
5	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5.2.1.1.1.2	8.500.000.000,00	7.053.749.676,00	82,99	6.212.686.828,00
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA	5.2.1.1.1.3	9.088.203.219,00	9.088.203.219,39	100,00	8.205.702.460,00
7	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	5.2.1.1.1.4	194.321.973.702,00	202.741.385.813,11	104,33	270.698.928.473,94
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER - LRA (11 + 17)	5.2.1.1.2	1.836.059.294.458,00	1.908.970.208.199,00	103,97	1.890.940.863.341,00
10						
11	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA (12 s/d 15)	5.2.1.1.2.1	1.813.816.245.458,00	1.875.149.171.199,00	103,38	1.818.653.490.341,00
12	Bagi Hasil Pajak - LRA	5.2.1.1.2.1.1	113.859.704.447,00	122.010.301.004,00	107,16	141.163.908.009,00
13	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	5.2.1.1.2.1.2	379.780.348.011,00	444.503.626.692,00	117,04	243.360.751.954,00
14	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	5.2.1.1.2.1.3	1.078.281.761.000,00	1.080.588.578.315,00	100,12	1.077.878.230.685,00
15	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	5.2.1.1.2.1.4	240.894.374.000,00	228.046.665.188,00	94,67	356.250.599.693,00
16						
17	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	5.2.1.1.2.2	22.243.049.000,00	33.821.037.000,00	152,05	72.296.373.000,00
18	Dana Penyesuaian - LRA		22.243.049.000,00	33.821.037.000,00	152,05	72.296.373.000,00
19						
20	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA (21 s/d 22)	5.2.1.1.3	350.000.000,00	6.857.420.256,00	1.959,26	40.748.257.367,98
21	Pendapatan Hibah - LRA		350.000.000,00	5.776.633.300,00	1.650,47	315.000.000,00
22	Pendapatan Lainnya - LRA		0,00	1.080.786.956,00	0,00	40.433.257.367,98
23						
24	BELANJA (26 + 34 + 42)	5.2.1.2	2.372.339.063.769,00	2.127.803.331.976,81	89,66	2.050.044.253.908,86
25						
26	BELANJA OPERASI (27 s/d 32)	5.2.1.2.1	1.744.064.114.776,00	1.629.460.884.903,74	93,43	1.647.219.558.627,47
27	Belanja Pegawai	5.2.1.2.1.1	753.427.506.803,00	714.859.072.319,00	94,88	638.555.013.259,27
28	Belanja Barang dan Jasa	5.2.1.2.1.2	912.665.972.821,00	837.011.356.496,74	91,71	787.157.711.061,20
29	Belanja Bunga	5.2.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Belanja Subsidi	5.2.1.2.1.4	15.973.945.925,00	13.973.868.042,00	87,48	21.167.303.205,00
31	Belanja Hibah	5.2.1.2.1.5	61.471.489.227,00	63.154.227.474,00	102,74	199.114.237.682,00
32	Belanja Bantuan Sosial	5.2.1.2.1.6	525.200.000,00	462.359.772,00	88,03	1.225.293.420,00
33						
34	BELANJA MODAL (35 s/d 40)	5.2.1.2.2	624.724.948.993,00	496.619.274.367,07	79,49	390.900.388.868,39
35	Belanja Modal Tanah	5.2.1.2.2.1	92.054.062.518,00	51.978.878.050,00	56,47	23.338.573.244,00
36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.2.1.2.2.2	196.985.930.843,00	134.331.790.579,07	68,19	95.562.120.412,00
37	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.2.1.2.2.3	260.402.195.386,00	239.048.835.735,00	91,80	173.436.399.485,39
38	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.2.1.2.2.4	71.494.930.181,00	67.684.084.890,00	94,67	76.752.834.826,00
39	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.2.1.2.2.5	3.787.830.065,00	3.577.704.313,00	94,45	21.810.460.901,00
40	Belanja Modal Aset Lainnya	5.2.1.2.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
41						
42	BELANJA TAK TERDUGA	5.2.1.2.3	3.550.000.000,00	923.172.706,00	26,00	11.924.306.413,00
43	Belanja Tak Terduga		3.550.000.000,00	923.172.706,00	26,00	11.924.306.413,00
44						
45	TRANSFER (47 + 50)	5.2.1.3	429.318.695.743,00	426.574.659.154,21	99,36	322.601.636.378,20
46						
47	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	5.2.1.3.1	247.045.845.743,00	244.301.809.158,00	98,89	250.853.386.378,20
48	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		247.045.845.743,00	244.301.809.158,00	98,89	250.853.386.378,20
49						
50	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN (51 s/d 52)	5.2.1.3.2	182.272.850.000,00	182.272.849.996,21	100,00	71.748.250.000,00
51	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		182.272.850.000,00	182.272.849.996,21	100,00	71.748.250.000,00
52	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
53						
54	BELANJA DAN TRANSFER (24 + 45)	5.2.1.3.3	2.801.657.759.512,00	2.553.577.991.131,02	91,15	2.372.645.090.287,06
55						
56	SURPLUS / (DEFISIT)	5.3.1.4	(248.110.709.795,00)	177.913.826.320,48	(71,71)	236.855.953.726,86
57						
58	PEMBIAYAAN	5.3.1.5				
59						
60	PENERIMAAN PEMBIAYAAN (61 s/d 62)		263.110.709.795,00	246.200.110.390,87	93,57	47.254.756.068,14
61	Penggunaan SILPA		263.110.709.795,00	246.200.110.390,87	93,57	47.254.756.068,14
62	Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00	0,00	0,00
63						
64	PENGELUARAN PEMBIAYAAN (65 s/d 66)		15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	21.000.000.000,00
65	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		0,00	0,00	0,00	0,00
66	Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah		15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	21.000.000.000,00
67						
68	PEMBIAYAAN NETTO	5.2.1.5.3	248.110.709.795,00	231.200.110.390,87	93,18	26.254.756.068,14
69	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.2.1.6	0,00	409.113.936.711,35	0,00	263.110.709.795,00

Gubernur Kalimantan Utara,

H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum.





BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 69.B/LHP/XIX.TJS/V/2023 tanggal 11 Mei 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Tarakan, 11 Mei 2023

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



**Ruben Arlia Lumbantoruan S.E., Ak., M.Si, CA,
ACPA, CSFA, ERMAP, CDCP, CertDA, CFrA
Register Negara Akuntan No. 2614**